

ABSTRAK

Peneliti, Mini.Puspita.Sari. 2026. Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Mukomuko (Studi Kasus Pendidikan Anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM)).Tesis S-2 Program Studi Pedagogi.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.Pembimbing (1): Dr.Nopriyeni,M.Pd Pembimbing (2): Dr.Adi.Asmara,M.Pd.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bidang pendidikan di Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pencapaian komponen pendidikan pada keluarga penerima manfaat (KPM). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pendamping PKH, aparat desa, pihak sekolah, orang tua, serta anak KPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif implementasi PKH telah berjalan sesuai prosedur dan dilihat dari sisi substansi masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti rendahnya tingkat kehadiran siswa, kurangnya motivasi belajar, serta adanya kasus putus sekolah. Faktor utama yang mempengaruhi kondisi tersebut meliputi keterbatasan ekonomi keluarga, anak yang harus membantu pekerjaan orang tua, kurangnya pengawasan pendidikan di rumah, serta lemahnya koordinasi antar pelaksana program. Dengan demikian, implementasi PKH di Desa Tunggal Jaya dapat dikategorikan cukup baik secara prosedural, namun belum optimal dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pendidikan anak KPM.

Kata Kunci:*Program Keluarga Harapan, Pendidikan, Kemiskinan, Implementasi Kebijakan*

ABSTRACT

Mini Puspita Sari, 2026. *“The Implementation of Family Hope Program (PKH) in Mukomuko Regency (A Case Study on the Education of Children from Beneficiary Families (KPM)).”* Thesis: Pedagogy Master Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Supervisors: (1) Dr. Nopriyeni, M.Pd. (2) Dr. Adi Asmara, M.Pd.

This study aims to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) in the education sector in Tunggal Jaya Village, Teras Terunjam District, Mukomuko Regency, and to identify factors influencing the suboptimal achievement of educational components among beneficiary families (KPM). This study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The informants included PKH facilitators, village officials, teachers, parents, and children from beneficiary families. The results show that administratively, the implementation of PKH has been carried out in accordance with established procedures, as reflected in the phased distribution of assistance, the implementation of Family Development Sessions (P2K2), and ongoing social assistance. The program has also contributed positively to improving access to education, particularly in supporting school-related needs and increasing parental awareness of the importance of education. Substantively, several issues remain, including low student attendance, lack of learning motivation, and cases of school dropout. The main contributing factors include economic constraints, children's involvement in helping their parents work, limited parental supervision, and weak coordination among program implementers. Therefore, the implementation of PKH in Tunggal Jaya Village can be considered procedurally adequate but not yet optimal in improving the quality and sustainability of education for beneficiary children.

Keywords: *Family Hope Program, Education, Poverty, Policy Implementation*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menekan angka kemiskinan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang belum mampu mengatasi permasalahan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada September 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta orang. Sementara itu, pada Maret 2025, angka tersebut menurun menjadi 8,47% dengan jumlah penduduk miskin sekitar 23,85 juta orang. Penurunan ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 210 ribu penduduk yang berhasil keluar dari garis kemiskinan selama periode enam bulan tersebut.

Meskipun jumlah dan persentase penduduk miskin menurun, garis kemiskinan nasional justru meningkat. Pada September 2024, garis kemiskinan berada di angka 595.242 per kapita, sedangkan pada Maret 2025 naik menjadi 609.160 per kapita. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya harga barang dan jasa, khususnya pada komoditas makanan pokok dan kebutuhan dasar lainnya, yang berdampak pada biaya hidup masyarakat (BPS, 2025).

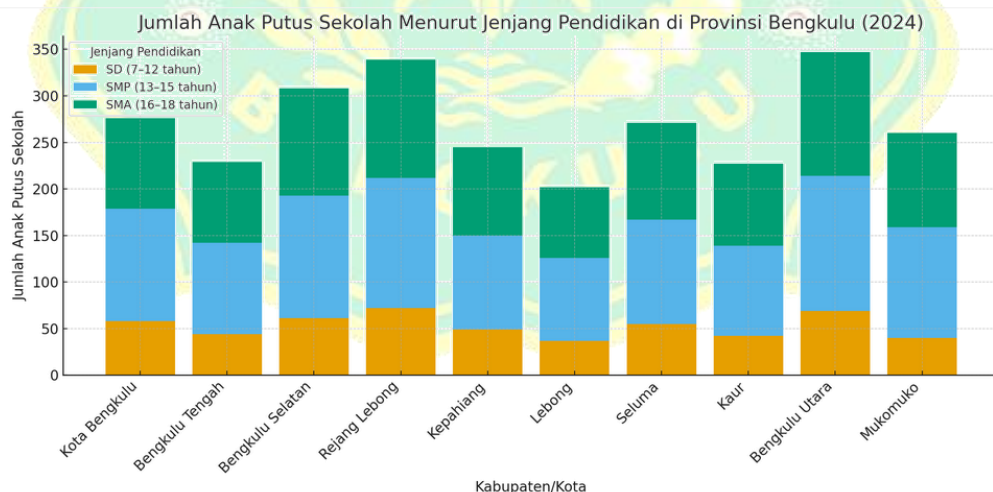
Pemerintah Indonesia secara konsisten menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan melalui berbagai kebijakan, salah satunya bantuan PKH yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial bersyarat (*conditional cash*

transfer). Program ini dirancang untuk mendorong keluarga miskin agar memenuhi kewajiban dasar di bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga anak-anak dari KPM dapat mengakses layanan pendidikan secara berkelanjutan. Meskipun program ini telah berjalan secara nasional sejak tahun 2007, capaian di lapangan masih menunjukkan ketimpangan, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi (Kemensos RI, 2023).

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu (2024), persentase penduduk miskin di provinsi ini mencapai 14,15 %, atau hampir dua kali lipat dari angka nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sekitar satu dari tujuh penduduk di Provinsi Bengkulu masih hidup di bawah garis kemiskinan. Rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas, kesenjangan sosial ekonomi, dan terbatasnya kesempatan kerja produktif menjadi faktor utama penyebab kondisi tersebut. Dari sisi pendidikan, meskipun Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Bengkulu tergolong tinggi misalnya pada tingkat pendidikan dasar mencapai sekitar 98,5% menurut data Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu per Juni 2025 namun masih ditemukan fenomena anak putus sekolah. Di Kota Bengkulu, pada tahun ajaran 2023/2024 tercatat terdapat 64 anak SD yang putus sekolah, sedangkan di Kabupaten Bengkulu Tengah jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) mencapai 1.494 anak pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan bantuan sosial bersyarat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) belum sepenuhnya efektif dalam memastikan anak-anak

dari keluarga penerima manfaat dapat terus mengakses dan menyelesaikan pendidikan formal (Martsha, 2024).

Kabupaten Mukomuko terletak di bagian utara Provinsi Bengkulu menghadapi tantangan serupa dalam implementasi program sosial dan pendidikan. Berdasarkan BPS Kabupaten Mukomuko (2024), tingkat kemiskinan di daerah ini tercatat sebesar 5,79 %, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Meskipun demikian, masih terdapat ribuan keluarga miskin yang bergantung pada bantuan sosial pemerintah, salah satunya melalui PKH. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko (2024), terdapat sekitar 7.821 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, sebagian besar dengan komponen anak usia sekolah dasar dan menengah. Namun, berbagai laporan di lapangan menunjukkan masih adanya penerima manfaat yang tidak memenuhi kewajiban pendidikan anaknya, baik karena faktor ekonomi, jarak sekolah yang jauh, minimnya transportasi, maupun rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan.



Gambar. 1 Jumlah Anak Putus Sekolah di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu (2024).

Grafik di atas menunjukkan sebaran jumlah anak putus sekolah di Provinsi Bengkulu berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2024. Terlihat bahwa angka putus sekolah paling banyak terjadi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang menandakan masa transisi dari pendidikan dasar ke menengah masih menjadi titik rawan bagi keberlanjutan pendidikan anak. Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Utara mencatat jumlah tertinggi, masing-masing lebih dari 300 anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Sementara itu, Kabupaten Mukomuko menempati posisi menengah dengan 220 anak putus sekolah, yang sebagian besar berada di jenjang SMP (119 anak) dan SMA (101 anak).

Pola ini menunjukkan adanya fenomena penurunan partisipasi pendidikan setelah lulus SD, sejalan dengan temuan BPS bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurun dari 99,13% di SD menjadi 96,42% di SMP. Permasalahan ini semakin kompleks karena di beberapa kecamatan, anak-anak penerima bantuan sering absen, tidak menyelesaikan tahun ajaran, atau bahkan bekerja membantu orang tua, sehingga berisiko putus sekolah dini. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan PKH dengan realitas pelaksanaannya di tingkat lokal.

Laporan Kompas oleh Hardiantoro & Nugroho (2023) juga mengungkapkan bahwa di sejumlah wilayah perdesaan di Sumatra dan Jawa, anak-anak penerima PKH masih menghadapi hambatan psikososial, seperti rendahnya motivasi belajar, kurangnya bimbingan orang tua, serta stigma sosial karena status kemiskinan, yang berdampak pada rendahnya kehadiran di sekolah. Sementara itu, Arsika (2024) menulis bahwa sebagian anak penerima PKH

mengalami keterlambatan belajar dan tidak naik kelas, disebabkan oleh absensi tinggi dan kurangnya dukungan belajar di rumah, yang berimplikasi pada efektivitas bantuan pendidikan bersyarat.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa motivasi belajar anak penerima PKH cenderung rendah. Banyak anak lebih memilih membantu pekerjaan rumah atau bekerja harian ketimbang bersekolah penuh waktu. Beberapa anak bahkan tidak memiliki fasilitas belajar memadai di rumah, seperti meja belajar atau alat tulis lengkap. Sementara itu, guru-guru menyebutkan bahwa dukungan orang tua terhadap kegiatan belajar masih minim. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan bantuan PKH belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung keberhasilan pendidikan anak.

Berdasarkan data dan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi anak dari keluarga penerima manfaat PKH meliputi rendahnya kehadiran dan motivasi belajar, ketidakteraturan kehadiran sekolah, pemanfaatan bantuan yang tidak diarahkan untuk pendidikan, lemahnya peran pendamping sosial dan orang tua, serta faktor geografis dan keterbatasan sarana pendidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap belum tercapainya target PKH pada aspek pendidikan di Kabupaten Mukomuko, agar dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan dirumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah anak dari keluarga miskin. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkuat peran PKH sebagai instrumen sosial yang mampu memutus rantai kemiskinan melalui Pendidikan.

B. Fokus dan Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan judul penelitian yang telah disampaikan di atas, penelitian ini mengambil permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tunggal Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko pada komponen Pendidikan ?
2. Apa saja faktor penyebab belum tercapainya target komponen pendidikan pada keluarga penerima manfaat PKH di Desa Tunggal Jaya?

Agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas dari pokok pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa hal berikut:

1. Penelitian hanya difokuskan pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berkaitan dengan komponen pendidikan bagi keluarga penerima manfaat (KPM).
2. Lokasi penelitian dibatasi di Desa Tunggal Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko.
3. Subjek penelitian meliputi pendamping PKH, keluarga penerima manfaat (KPM), serta pihak terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan PKH di bidang pendidikan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tunggal Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko pada komponen pendidikan?

2. Untuk Mengetahui faktor penyebab belum tercapainya target komponen pendidikan pada keluarga penerima manfaat PKH di Desa Tunggal Jaya?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan kepustakaan baru pada penelitian sosial selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Tunggal Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko khususnya bidang Pendidikan.

- b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bermanfaat bagi pemerintah khususnya penyelenggara Program Keluarga Harapan di Desa Tunggal Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko untuk berusaha mengoptimalkan bantuan sosial terus bagi masyarakat miskin.

E. Definisi Operasional Istilah

Agar penelitian ini memiliki kejelasan konseptual dan batasan yang terukur, maka istilah-istilah utama dalam penelitian ini dijelaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat (*conditional cash transfer*) yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang telah ditetapkan sebagai

Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam konteks penelitian ini, PKH diartikan sebagai program perlindungan sosial yang mewajibkan penerima manfaat untuk memenuhi komponen pendidikan, yaitu memastikan anak usia sekolah dasar dan menengah aktif bersekolah dengan tingkat kehadiran minimal 85% per bulan sebagai syarat pencairan bantuan (Kemendagri RI, 2021).

2. Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah rumah tangga yang terdaftar dan dinyatakan memenuhi kriteria kemiskinan oleh Kementerian Sosial RI serta berhak menerima bantuan PKH. Dalam penelitian ini, KPM yang dimaksud adalah keluarga miskin di Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko yang memiliki anak usia sekolah dan terdaftar sebagai penerima PKH aktif pada tahun 2024–2025 (Kemendagri RI, 2021)

3. Komponen Pendidikan PKH

Komponen pendidikan PKH adalah salah satu syarat utama dalam program ini, yang mewajibkan keluarga penerima manfaat untuk memastikan anaknya bersekolah dan tidak mengalami putus sekolah. Dalam penelitian ini, komponen pendidikan dioperasionalkan melalui indikator:

- a) Tingkat kehadiran anak di sekolah minimal 85%;
- b) Anak aktif terdaftar di sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan SMA

- c) Pemanfaatan bantuan PKH mendukung kebutuhan pendidikan seperti seragam, alat tulis, dan biaya transportasi sekolah

